

## Tipologi Partisipasi Politik Generasi Z ditinjau dari Pendidikan Politik Melalui PPKn dan Akses Media Sosial

Dyah Estyani Cahya<sup>1</sup>, Nasiwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: [dyahestyani@gmail.com](mailto:dyahestyani@gmail.com), [nasiwan@uny.ac.id](mailto:nasiwan@uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn berikut persepsi peserta didik terhadap pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn; Menganalisis partisipasi politik generasi Z di media sosial; dan menganalisis tipologi partisipasi politik generasi Z berdasarkan pendidikan politik yang telah diperoleh melalui mata pelajaran PPKn serta keterpaparan berita politik di media sosial. Penelitian ini merupakan studi fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sumber data penelitian menggunakan teknik purposive, meliputi: Wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMA Negeri 1 Depok Sleman, guru pengampu mata pelajaran PPKn, peserta didik yang merupakan generasi Z, serta pengamat politik wilayah DIY dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP). Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan **model Creswell**. Hasil penelitian ini menunjukkan keterampilan partisipasi politik peserta didik ditinjau berdasarkan implementasi pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri Depok Sleman belum terbentuk, meskipun berdasarkan persepsinya peserta didik sudah merasa cukup puas dengan pembelajaran yang diperoleh; generasi Z tidak menempatkan media sosial sebagai sarana yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam konteks politik; dan partisipasi politik generasi Z tergolong ke dalam tipologi yang militan hipokrit.

**Kata Kunci:** generasi z; media sosial; pendidikan politik; partisipasi politik

### Abstract

*This study aims to (1) analyze the implementation of political education through PPKn subjects and students' perceptions of political education through PPKn subjects; (2) Analyzing the political participation of Generation Z on social media; and (3) analyze the typology of political participation of Generation Z based on political education that has been obtained through PPKn subjects and exposure to political news on social media. This research is a phenomenological study with a qualitative approach. The determination of research data sources used purposive techniques, including: Deputy principal of the curriculum section of SMA Negeri 1 Depok Sleman, teachers of PPKn subjects, students who are generation Z, and political observers in the DIY region from the Independent Election Awareness Committee (KISP). The research data collection technique uses in-depth interview, observation, and documentation techniques. The validity of the data was checked using the triangulation technique. Data analysis using models Creswell. The results of this study show that (1) the political participation skills of students reviewed based on the implementation of political education through PPKn subjects at SMA Negeri Depok Sleman have not been formed, even though based on their perception students are quite satisfied with the learning obtained; (2) Generation Z does not place social media as a means of enabling participation in the political context; and (3) the political participation of Generation Z is classified as a hypocritical militant political.*

**Keywords:** generation Z; social media; political education; political participation

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang disematkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Bachtiar, 2014). Dalam sistem politik demokrasi, rakyat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan mereka yang tinggal di perkotaan. Karakter yang menonjol dari generasi Z ini yaitu mereka senang berkomunikasi dengan cara yang modern, ingin memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik secara langsung atas apa yang diterima, serta mengonsumsi informasi yang mudah diakses dan dipahami, sehingga mereka cenderung pragmatis terhadap informasi yang diterimanya (Swanzen, 2018). Sementara di tengah perkembangan arus teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat seperti saat ini, munculnya media baru seperti internet dan media sosial turut menunjukkan fenomena yang identik dengan adanya komodifikasi dan perspektif artifisial. Di mana sesuatu yang apabila secara kontinyu disebarkan secara terus menerus, meskipun bukan suatu kebenaran, akan dianggap sebagai kebenaran. Hal tersebut turut mempengaruhi jalan pikiran (*theater of mind*) dari si penerima pesan (Andriani, 2022).

Sebagai generasi yang akan meneruskan tatanan politik agar dapat melanjutkan perjuangan dalam membangun bangsa, maka sudah sepatutnya generasi Z dibekali literasi politik yang diimbangi dengan kesadaran partisipatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, di sinilah letak urgensi dari pendidikan politik. Karena melalui pendidikan lah maka pemahaman, kesadaran, dan keterampilan untuk partisipasi dalam politik dapat ditingkatkan (Fierna et al., 2022). Hal tersebut memberikan arti bahwa pendidikan politik memiliki keunggulan moral di atas tujuan pendidikan publik lainnya dalam masyarakat demokratis, yakni untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang dapat mencapai cita-cita tidak hanya dari pendidikan demokrasi tetapi juga politik demokratis itu sendiri (Nasiwan, 2014). Dengan kata lain, pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk mempelajari tatanan politik yang berlaku, tetapi juga mengharuskan individu untuk belajar, menciptakan, dan memodifikasi tatanan politik.

Di Indonesia, pendidikan politik yang diberikan kepada generasi Z pada lingkup pendidikan formal di tingkat sekolah bukanlah suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Aktifitas belajar mengajar melalui PPKn di sekolah inilah yang semestinya dapat menjadi potensi sumber pengetahuan yang dapat membentuk preferensi awal politik bagi para peserta didik (Tamma, 2021). Hal senada juga dikemukakan oleh (Alrakhman et al., 2023) bahwa melalui PPKn memungkinkan setiap orang akan memahami nilai dan komitmennya sebagai individu serta anggota masyarakat yang akan memberikan partisipasinya dalam kebijakan politik.

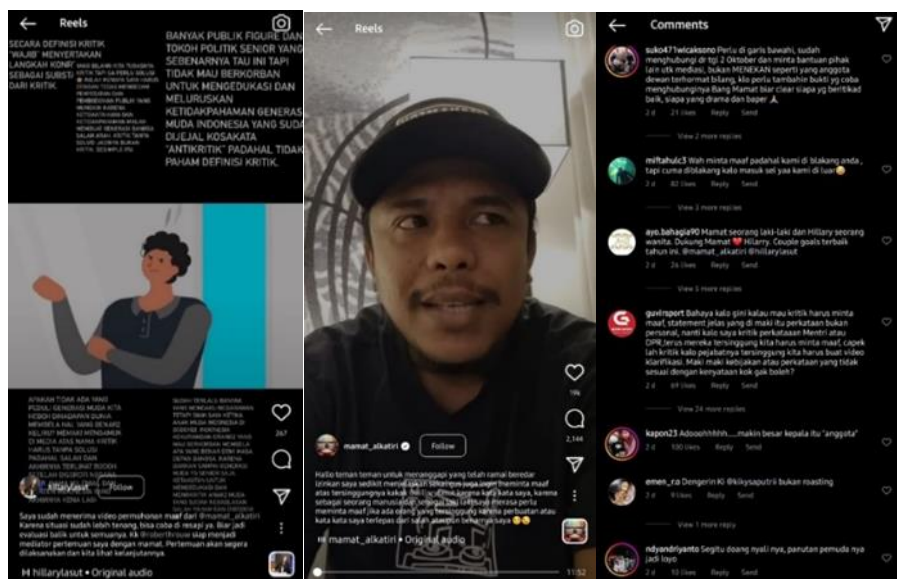
Di samping pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn, hal yang tak dapat dielakkan dari kehidupan para generasi Z saat ini adalah banjirnya informasi yang diterima akibat dari masifnya penggunaan media sosial yang sedang berkembang pesat seperti saat ini. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia per tahun 2021 mencapai 210 juta jiwa dari total populasi 272 juta jiwa. Media sosial merupakan *platform* yang paling banyak digunakan, yaitu sekitar 89,15% dari total pengguna internet atau setara dengan 186 juta jiwa. Penggunaanya didominasi oleh anak muda pada rentang usia antara 13-18 tahun yang termasuk ke dalam kategori generasi Z (APJI, 2022). Sementara laporan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa media sosial menduduki posisi tertinggi sebagai sumber informasi bagi pemilih pemula (CSIS, 2023).

Media sosial yang menawarkan berbagai efektivitas dan kemudahan tersebut dipilih dan dimanfaatkan oleh generasi Z tidak hanya sebagai sarana komunikasi atau eksistensi diri, melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk partisipasi dalam menanggapi isu atau masalah-masalah sosial politik yang ada. Tren saat ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik anak muda dilakukan

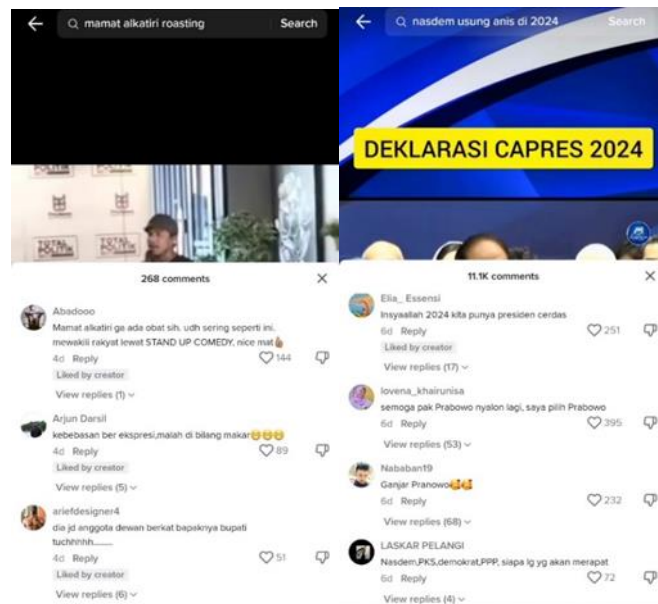
dalam berbagai cara, yakni tidak terbatas lewat kaderisasi parpol atau ormas-ormas sayapnya, ataupun bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional lainnya. Corak yang membedakan generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya adalah dengan makin banyaknya aksi yang dilakukan secara personal yang diinisiasi oleh individu, bukan organisasi. Contohnya, saat ini terdapat banyak anak muda yang merupakan generasi Z menjadi social influencer melalui unggahannya di media sosial, menghimpun dana sosial, mengajukan petisi, menulis gagasan ataupun kolom opini, hingga membuat meme untuk menyindir pejabat. Salah satu contohnya sebagai berikut:



Gambar 1. X Sebagai Sarana Informasi Politik Dan Partisipasi Politik  
Sumber: observasi peneliti (2022)



Gambar 2. Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Politik Dan Partisipasi Politik  
Sumber: observasi peneliti (2022)



**Gambar 3. Tiktok Sebagai Sarana Komunikasi Politik Dan Partisipasi Politik**  
Sumber: observasi peneliti (2022)

Gambar-gambar di atas membuktikan bahwasanya media sosial saat ini memang dimanfaatkan sebagai wadah untuk berbagi informasi politik maupun partisipasi politik oleh warga negara, yang biasanya dilakukan dengan cara menunjukkan respon terhadap suatu kebijakan politik maupun permasalahan politik yang sedang dibahas. Akan tetapi pada survey yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia (LIPI) kepada 1.200 responden berusia 17-21 tahun menunjukkan bahwa sebanyak 64,7% anak muda justru menilai bahwa partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik atau tidak baik sama sekali dalam mewakili aspirasi masyarakat (Umbari, 2021). Adapun pada survey terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Januari 2022 menunjukkan bahwa citra partai politik di Indonesia di mata generasi muda termasuk generasi Z tergolong sangat rendah. Hal ini karena partai politik dianggap lebih memanfaatkan popularitas alih-alih memberikan visi, misi, dan program kerja yang baik (Nugraheni, 2022). Hal ini tampak menunjukkan bahwa sektor politik termasuk yang paling sulit dipercaya oleh anak muda.

Berangkat dari fenomena-fenomena tersebutlah yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Depok Sleman. Di sekolah tersebut, pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn diberikan pada materi-materi berdimensi politik yang membahas terkait sistem pemerintahan di kelas X, dan materi terkait demokrasi di kelas XI. Di samping itu, peserta didik mempersepsikan bahwasanya pendidikan politik melalui PPKn telah memberikan mereka pengetahuan dasar tentang politik.

Peserta didik yang merupakan generasi Z di SMA Negeri 1 Depok Sleman juga merupakan pengguna aktif media sosial di antaranya *Instagram*, *X*, dan *Tiktok* dengan durasi penggunaan rata-rata 5-7 jam perharinya. Namun demikian, mereka tampak sama sekali tidak mengikuti akun-akun baik itu politisi, partai politik, aktivis politik, maupun media yang kerap memberikan konten atau informasi terkait perkembangan politik di Indonesia. Mereka hanya mengetahui perkembangan politik yang terjadi di Indonesia secara tidak disengaja atas perintah algoritma media sosial. Selain itu, mereka juga cenderung tidak mempercayai politisi maupun pemerintah, inilah yang menyebabkan mereka cenderung melewatkan begitu saja apabila terpapar oleh berita maupun isu-isu politik yang beredar di

media sosial.

Fenomena yang peneliti temukan di lapangan ini sejalan dengan laporan yang dirilis oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) tentang tingkat kepercayaan pemilih pemula terhadap lembaga negara yang dilaksanakan pada periode Agustus 2022. Dalam hal ini lembaga perwakilan yakni DPD dan DPR menempatkan posisi sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya (CSIS, 2023). Penelitian ini memiliki urgensi oleh karena generasi Z yang menjadi subjek dari penelitian ini akan menjadi sektor pemilih pemula pada agenda pemilihan umum tahun 2024. Untuk itu penting kiranya menyelami secara mendalam mengapa generasi Z ini bersikap acuh terhadap politik sehingga dapat pula dianalisa berada di tipe manakah partisipasi politik generasi Z ini.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi, yaitu penelitian tentang apa yang tampak atau yang menampakkan diri (fenomena). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fenomenologi dengan paradigma konstruksi sosial Creswell (2018). Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive*, di antaranya ialah: (1) wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMA Negeri 1 Depok Sleman dan guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Depok Sleman sebagai informan kunci; (2) peserta didik yang merupakan generasi Z sebagai informan utama; serta (3) pengamat politik wilayah DIY dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai informan pendukung. Pada penelitian ini selanjutnya digunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik (Hamzah, 2020). Sementara metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data di antaranya dengan membuat kode atas data, mengkategorisasikan data, dan membuat tema terhadap data hingga selanjutnya dapat membuat sintesa serta menjawab pertanyaan penelitian (Creswell & Poth, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterampilan Partisipasi Politik Peserta Didik Berdasarkan Implementasi Pendidikan Politik Melalui Mata Pelajaran PPKn Belum Cukup Terbentuk**

Penelitian ini menemukan bahwasanya dalam implementasi pendidikan politik melalui PPKn terdiri atas tiga poin utama, yakni: kurikulum yang diterapkan, kegiatan pembelajaran, serta adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan politik di SMA Negeri 1 Depok Sleman. Dalam implementasinya, pendidikan politik yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn pada kurikulum 2013 tercakup ke dalam materi-materi berdimensi politik di antaranya (1) nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; (2) tugas dan wewenang lembaga negara; (3) hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah; serta (4) sistem dan dinamika politik di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, guru juga telah mengupayakan berbagai strategi mulai dari mengaitkan materi dengan fenomena politik yang terjadi, hingga memadukan pembelajaran berbasis demonstrasi di media sosial. Kecakapan peserta didik dalam penggunaan perangkat digital turut menjadi faktor pendukung kegiatan pembelajaran. Sementara adanya perbedaan minat belajar antar peserta didik pada mata pelajaran PPKn serta kejenuhan yang kerap dirasakan peserta didik karena materi PPKn yang terlalu luas turut menjadi faktor penghambat kegiatan pembelajaran.

Adapun dalam konteks pendidikan politik secara lebih luas di SMA Negeri 1 Depok Sleman juga didukung dengan diselenggarakannya kegiatan pemilihan OSIS serta adanya kerjasama pihak sekolah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam kegiatan sosialisasi pemilihan umum di sekolah tersebut. Sedangkan faktor penghambat pendidikan politik di

SMA Negeri 1 Depok Sleman dikarenakan pendidikan politik pada dasarnya tidak menjadi target khusus yang ingin dicapai sekolah, kurikulum pendidikan politik melalui PPKn yang sifatnya masih sangat umum, serta banyak dari peserta didik yang tidak menunjukkan minat pada sektor politik.

Implementasi pendidikan politik tersebut kemudian tercermin ke dalam persepsi peserta didik terhadap pembelajaran yang ditandai dengan empat poin penting, di antaranya: peserta didik mendapatkan pemahaman dasar tentang politik, peserta didik mampu menganalisis permasalahan politik yang dilihatnya, namun pengetahuan dan kemampuan analisis masalah tersebut tidak sejalan dengan keterampilan partisipasi politiknya. Hal ini ditandai dengan hanya sebagian kecil peserta didik yang menunjukkan antusiasme dalam diskusi bertema perkembangan politik yang sedang terjadi. Namun meskipun demikian peserta didik merasa sudah cukup puas dengan pendidikan politik yang diperoleh melalui mata pelajaran PPKn.

Peneliti melihat bahwasanya terdapat ketidakselarasan antara pernyataan peserta didik yang merasa mendapatkan pengetahuan politik pun memiliki kesadaran terhadap kondisi perpolitikan yang ada, namun tidak dibuktikan dengan tindakannya dalam menyikapi kondisi perpolitikan tersebut. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan (Yahzinka, 2019) yang menegaskan bahwa PPKn seharusnya ditujukan sebagai upaya seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*. Di samping juga tidak sejalan dengan (Susanto, 2016) yang menyatakan bahwa kurikulum PPKn hendaknya memenuhi tiga unsur yang harus dicapai di antaranya: (1) *civic knowledge*, berkaitan dengan pengetahuan serta isu-isu kenegaraan apa yang harus warga negara ketahui; (2) *civic skills*, berkaitan dengan keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatif; serta (3) *civic disposition*, berkaitan dengan komitmen akan nilai-nilai yang perlu dipelihara dalam demokrasi konstitusional.

Hal ini berarti bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan yang tertuang dalam kurikulum pendidikan politik yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn dengan hasil yang dicapai, yakni warga negara yang tidak memiliki kecakapan partisipasi di dalam konteks politik. Pendidikan politik yang diterima melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Depok Sleman belum berhasil dalam mewujudkan akumulasi atas pemikiran, sikap, dan tindakan peserta didik dalam konteks politik.

Pendidikan politik yang dapat mewujudkan akumulasi ketiga aspek kecakapan politik tersebut sejatinya sudah harus ada dalam kurikulum pendidikan politik terlebih di tingkat menengah atas. Sebab peserta didik pada usia jenjang pendidikan menengah atas tersebut merupakan warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya dalam agenda pemilihan umum. Untuk itu sudah selayaknya mereka memiliki bekal yang cukup sebelum akhirnya mereka menentukan pilihan hingga muncul kebijakan-kebijakan politik yang terlahir dari pilihannya. Menjawab kesenjangan yang ditemukan, maka perlu kiranya untuk meninjau ulang dan menata kembali kurikulum pendidikan politik terutama yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn. Sekiranya pendidikan politik di tingkat pendidikan menengah atas akan lebih bermakna apabila pendidikan tersebut tidak semata-mata mengajarkan tentang konsep-konsep dari sistem politik. Akan tetapi lebih menempatkan bagaimana pendidikan tersebut mampu mengajak peserta didik untuk berpikir tentang output dari sistem demokrasi dan kegiatan pemilu. Hal ini berkaitan dengan penanaman kesadaran akan seberapa penting perannya dalam mempengaruhi proses perumusan hingga penetapan suatu kebijakan politik, serta seberapa penting perannya sebagai generasi yang akan meneruskan tatanan politik di Indonesia. Adapun di era kemajuan teknologi dan internet yang semakin pesat seperti saat ini pendidikan politik juga perlu membekali peserta didik terkait kecakapan akan literasi digital di samping juga diperlukan suatu model pembinaan kepada peserta didik dalam pembelajaran yang mengupayakan peserta didik akan terbiasa berpartisipasi dalam konteks politik.

## **Generasi Z Tidak Menempatkan Media Sosial sebagai Sarana yang Memungkinkan untuk Berpartisipasi dalam Konteks Politik**

Penelitian ini mengklasifikasikan penggunaan media sosial oleh generasi Z ke dalam dua aspek. Pertama, penggunaan secara umum yang ditandai dengan empat poin penting, di antaranya: durasi yang digunakan generasi Z dalam menggunakan media sosial berkisar antara lima jam hingga lebih setiap harinya, mereka menggunakan media sosial untuk kebutuhan hiburan, mereka memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat di media sosial, interaksi yang dilakukan umumnya dengan saling suka antar pengguna, saling mengomentari, berkomunikasi melalui pesan langsung, hingga saling menyebarkan konten yang bernuansa komedi.

Adapun aspek yang kedua ialah terkait sejauh mana mereka mengakses media sosial dalam konteks pembicaraan tentang perkembangan isu politik yang ditandai dengan tiga poin penting, di antaranya: sebagian besar generasi Z tidak mengikuti satu pun akun dari tokoh politik maupun akun-akun yang kerap memberikan berita politik di media sosial, mereka mengetahui berita politik dikarenakan berita tersebut muncul dengan sendirinya, mereka juga tidak pernah menanggapi berita politik yang mereka baca di media sosial.

Penelitian ini melihat bahwasanya mengapa mereka tampak tidak berpartisipasi dalam konteks politik di media sosial dikarenakan terdapat kesenjangan informasi politik yang diterima oleh setiap generasi Z dalam penelitian ini. Hal ini tidak lain karena generasi Z memang menempatkan media sosial hanya sebagai sarana memperkenalkan identitasnya sekaligus sarana dalam mencari hiburan. Sejalan dengan (Apandie, 2021) yang mengatakan bahwa tidak sedikit dari generasi Z yang justru memanfaatkan kecanggihan teknologi hanya sebagai media hiburan alih-alih menambah wawasan. Media sosial justru banyak digunakan oleh generasi Z sebagai ajang narsistik dan panjat sosial.

Temuan di atas dipertegas pula dengan karakteristik media sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh (Indainanto & Nasution, 2020) yaitu media sosial akan memungkinkan data bekerja secara otomatis membentuk algoritma yang menyeleksi berdasarkan informasi yang sering terjadi, sehingga pengguna cenderung akan terpapar konten yang serupa secara berkelanjutan dan terus menerus. Dengan demikian, maka apabila generasi Z tidak memiliki ketertarikan terhadap akun yang memuat informasi politik dengan tidak mengikuti apalagi melakukan interaksi di dalamnya, akan berdampak pada semakin sedikit pula keterpaparan mereka terhadap informasi politik.

Meskipun demikian, bukanlah hal yang mustahil apabila informasi politik tetap akan muncul dengan sendirinya dalam laman media sosial mereka melalui berbagai cara kerja algoritma media sosial. Misalnya melalui *trending X*, *fyp tiktok*, *explore instragram*, maupun karena adanya *likes* atau *repost* dari pengguna lain yang diikuti. Hal ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwasanya meskipun hampir seluruh generasi Z dalam penelitian ini mengaku tidak mengikuti satu pun akun yang memberikan informasi politik namun mereka tetap mengetahui beberapa kondisi politik yang terjadi akibat paparan berita yang tidak disengaja. Walau begitu, tidak pula berhasil membawa mereka dalam keinginan untuk turut menanggapi berita politik yang mereka baca tersebut.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan untuk melahirkan warga negara muda yang memiliki kecakapan partisipasi politik dengan warga negara muda dalam penelitian ini yang justru menunjukkan ketidaktertarikan terhadap sektor politik yang dibuktikan dengan tidak ditunjukkannya tindakan partisipatif dalam konten-konten di media sosial yang membahas isu politik. Penelitian ini melihat kesadaran generasi Z untuk memahami bahwa setiap kebijakan politik yang ada sejatinya akan berdampak pada kehidupan setiap warga negara tampak belum menjadi perhatian yang menyasar mereka, sehingga mereka tampak tidak berpartisipasi dalam berita-berita politik yang mereka baca tersebut. Bagi mereka mengakses informasi di media sosial sesuai dengan

kebutuhan merupakan tindakan paling ideal yang bisa mereka lakukan saat ini. Karena pada dasarnya media sosial adalah ruang yang sangat personal dan efek media sosial bergantung pada bagaimana orang memanfaatkannya.

### **Partisipasi Politik Generasi Z Tergolong dalam Tipologi yang Militan Hipokrit**

Penelitian ini akan memaparkan tipologi partisipasi politik generasi Z ditinjau dari pendidikan politik yang diperoleh serta bagaimana kebiasaan mereka mengakses media sosial yang dilihat dari dua poin penting. Pertama, kesadaran politik generasi Z sejatinya berada pada tataran tinggi, sebab mereka menyatakan kesadaran akan perannya sebagai generasi penerus serta memiliki suara yang dapat berdampak terhadap kebijakan politik. Kedua, kesadaran yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan para politisi. Hal ini dikarenakan mereka melihat banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para aktor politik serta kekecewaannya terhadap pemerintah yang baginya tidak mendengarkan suara rakyat.

Akan tetapi, di dalam penelitian ini ditemukan adanya ketidakselarasan antara pengakuan generasi Z terkait kesadaran politik yang tinggi dengan tidak adanya tindakan nyata dalam upaya untuk mengetahui kondisi perpolitikan yang terjadi di Indonesia, sehingga kesadaran yang tinggi tersebut sifatnya adalah semu. Sementara itu, kepercayaan politik generasi Z dalam penelitian ini tergolong rendah oleh karena banyaknya berita berkonotasi negatif dalam konteks politik yang mereka akses di media sosial secara tidak disengaja. Dengan demikian jika merujuk pada tipologi partisipasi politik oleh (Zarkasi, 2020), maka apabila kesadaran politik tinggi namun bersifat semu dan kepercayaan politiknya rendah, tergolong ke dalam tipologi yang militan hipokrit.

Dalam menganalisis temuan penelitian ini, peneliti juga berlandaskan pada teori *post-behavioral* (Frank & Cardoso; Nur, 2014) dalam menganalisis gejala politik tentang mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorong mereka terhadap hal itu dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Dalam hal ini karakteristik wilayah yang dimaksud tersebut tidak terlepas dari pembahasan pada bagian sebelumnya, yakni meninjau tipologi partisipasi politik generasi Z berdasarkan pendidikan politik yang mereka peroleh melalui PPKn dan keterpaparan pada berita politik yang beredar di media sosial.

Berkaca dari fenomena-fenomena yang ditemukan terkait adanya ketidakselarasan antara pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik generasi Z, peneliti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh (Pontes et al., 2019) yaitu di mana para generasi Z ini tampak tidak mau aktif dalam kehidupan sosial politik bukan tentang kurangnya pemahaman mereka tentang masalah kewarganegaraan, akan tetapi tentang mereka yang merasa dikecewakan oleh politisi. Di samping itu, mereka juga mengamati orang lain yang berupaya mempengaruhi politik dan belajar dari pengalaman orang lain tersebut tentang sejauh mana masyarakat awam dapat mempengaruhi politik (Almond & Verba, 2015) sehingga mereka merasa tidak ada peluang yang berarti untuk mempengaruhi dunia politik di sekitar mereka.

Adapun faktor lain yang juga peneliti temukan ialah bahwasanya tipologi partisipasi politik generasi Z di SMA Negeri 1 Depok Sleman selain dari pendidikan politik yang diperoleh, juga turut dipengaruhi oleh gerakan sosial politik yang berkembang di wilayah DIY, kehadiran *buzzer* politik yang mempengaruhi algoritma media sosial, serta keterbatasan lembaga negara dalam memberikan sosialisasi politik. Hal yang juga masih relevan untuk menganalisis pola perilaku politik generasi Z ialah bahwasanya terdapat pergeseran pola partisipasi politik antara generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Misalnya, pilihan politik generasi milenial cenderung akan tertuju pada politisi-politisi yang populis. Akan tetapi beda halnya dengan generasi Z yang belum tentu akan menjatuhkan pilihannya pada politisi yang populis, hal ini sedikit banyaknya juga dipengaruhi atas faktor dari banjirnya informasi politik yang mereka terima terutama pada informasi-informasi yang berkonotasi



negatif.

Di samping itu, meskipun generasi Z tampak tidak menunjukkan ketertarikannya dalam pembahasan mengenai politik di media sosial, pola yang berbeda justru ditunjukkan pada aksi-aksi sosial yang kerap dilakukan oleh mereka dalam laman digital dan media sosial. Misalnya, mereka melakukan penggalangan dana ataupun menyumbang uang dalam permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Tanpa mereka sadari tindakan yang mereka lakukan justru adalah bentuk dari partisipasi politik itu sendiri. Sebab ketika beraksi dalam aksi-aksi sosial, artinya mereka juga berbuat untuk negara. Mereka lebih memilih berpartisipasi dalam bantuan sosial ketimbang berbicara dan memprotes permasalahan sosial yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab fenomena tipologi partisipasi politik generasi Z dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada (Kahne & Bowyer, 2018) yang menyatakan bahwa bentuk kecenderungan partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok pemuda yakni berpartisipasi lebih banyak dalam bentuk-bentuk yang tidak dilembagakan. Bahkan kegiatan yang tidak berada di arena politik atau secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi aktor politik pun dapat dianggap sebagai partisipasi politik jika digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan tujuan dan maksud politiknya. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa masalah partisipasi politik pemuda tidak serta merta pada pertanyaan apakah mereka berpartisipasi, tetapi lebih pada masalah di mana dan bagaimana mereka berpartisipasi.

Pembahasan mengenai tipologi partisipasi politik generasi Z yang tergolong dalam militan hipokrit ini hendaknya menjadi cerminan bagi pemerintah dan para aktor politik untuk lebih meningkatkan elektabilitasnya. Sebab bukan tidak mungkin generasi ini akan bergeser menjadi generasi yang apatis terhadap politik apabila terus menerus terpupuk oleh berbagai keburukan yang dicontohkan oleh para politisi. Di samping itu agar pandangan yang dikemukakan oleh (Arpanudin & Aulia, 2020) yang menyatakan bahwa internet dan media sosial adalah demokrasi, tetapi tanpa konstitusi tidak menjadi fakta yang membudaya dalam jalannya sistem demokrasi di Indonesia, maka peran pemerintah dalam menciptakan demokrasi digital yang bersih dan sehat menjadi tanggungjawab yang besar.

## **KESIMPULAN**

Pertama, pendidikan politik di SMA Negeri 1 Depok Sleman terimplementasi dalam muatan materi berdimensi politik pada mata pelajaran PPKn. Di samping itu, peserta didik mempersepsikan bahwa mereka merasa cukup puas dengan pendidikan politik yang diperoleh. Pengetahuan politik yang diperoleh melalui mata pelajaran PPKn tersebut turut membentuk kesadaran politik peserta didik, namun hal itu tampak tidak sejalan dengan keterampilan partisipasi politik peserta didik. Kedua, generasi Z tidak menempatkan media sosial sebagai sarana yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam konteks politik. Ketiga, perilaku politik generasi Z dalam penelitian ini membawa mereka ke dalam klasifikasi tipologi partisipasi politik yang militan hipokrit. Yakni partisipasi politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi namun bersifat semu, dan kepercayaan politik yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Zarkasi, D. R. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4, 140. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1173>
- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy In Five Nations*. Princeton University Press.
- Alrahman, R., Budimansyah, D., Sapriya, & Rahmat. (2023). The Effect of Digital Citizenship on The Quality Learning Civic Education. *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4, 623. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.67086>
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum*, 1(1), 38–47.
- Apandie, C. (2021). Konstruksi Edukasi Bagi Warga Negara Muda pada Akun Media Sosial Twitter @ Asumsico. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.67086>
- Apji. (2022). Hasil Survey Profil Internet Indonesia 2022. *Apji.Or.Od*, June.
- Arpanudin, I., & Aulia, S. S. (2020). *Citizenship and Democracy: How Young Citizen Behave Democratically In Digital Age*. 418(Acec 2019), 391–395. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200320.074>
- Bachtiar. (2014). Pemilu di Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1), 1–7.
- Creswell. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design*. Sage.
- Fernandes, A., Suryahudaya, E., & Okhtariza, N. (2023). Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024 : Dinamis , Adaptif dan Responsif. *Centre for Strategic and International Studies*.
- Fierna, M., Lusie, J., & Rustandi, R. (2022). Tinjauan Sosiologis terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Sistem Politik di Indonesia. *Wiyatamandala: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2).
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Indainanto, Y. I., & Nasution, F. A. (2020). Representasi di Media Sosial sebagai Pembentuk Identitas Budaya Populer. *Jurnal Semiotika*, 14(1), 102–110.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). The Political Significance of Social Media Activity and Social Networks. *Political Communication*, 35(3), 470–493. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1426662>
- Nasiwan. (2014). The Dilemma of Political Education as A Transformation Basis of Jemaah Tarbiyah Movement. *Millah*, 8(2).
- Nugraheni, A. (2022). *Bagaimana Anak Muda Memandang Partai Politik?* Kompas.
- Nur, M. (2014). Rekonstruksi Epistemologi Politik: dari Humanistik Ke Profetik. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(1), 131–160.
- Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2019). Youth Political (DIS) Engagement and The Need for Citizenship Education: Encouraging Young People's Civic and Political Participation Through The Curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Singh, A. P., & Dangmei, J. (2016). Understanding The Generation Z: The Future Workforce. *South - Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, July.
- Susanto, E. (2016). *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Pengembangan Civic Disposition Siswa SMA N Se-Kota Bandar Lampung*. 1(1), 96–105.
- Swanzen, R. (2018). Facing The Generation Chasm: The Parenting and Teaching of Generations Y and

Z. *International Journal of Child, Youth And Family Studies*, 9(2), 125.  
<https://doi.org/10.18357/ijcyfs92201818216>

Tamma, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a3>

Umbari, I. (2021). *Survei Indikator: 64,7 Persen Anak Muda Nilai Politisi Tak Mewakili Aspirasi Rakyat*. Kompas.Com.

Yahzinka. (2019). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 87–91.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)